**KONFLIK YAMAN DAN KEPENTINGAN GEOPOLITIK ARAB SAUDI**

***Harmiyati***

 **Pendahuluan**

Konflik di Yaman yang telah berlangsung sejak tahun 2011 berkenaan dengan efek domino dari Revolusi Arab Spring, adalah konflik yang sangat rumit dan berkepanjangan. Konflik internal tersebut bahkan telah berkembang menjadi konflik regional bahkan internasional yang telah melibatkan negara-negara besar, khususnya Arab Saudi, Amerika Serikat, dan Inggris untuk ikut campur dalam persoalan Yaman. Intervensi Arab Saudi dan kawan-kawan lebih jauh ditandai dengan invasi militer pada tanggal 26 Maret 2015. Keterlibatan asing dalam kasus konflik Yaman mengakibatkan persoalan kian bertambah rumit dan tidak kunjung selesai. Meskipun akhir-akhir ini sudah ada upaya untuk mendamaikan pihak-pihak yang bertikai, tetapi tidak ada jaminan bahwa konflik di Yaman bisa terselesaikan melalui jalan perundingan karena besarnya kepentingan asing dalam konflik tersebut. Meskipun banyak analis yang berusaha mensimplifikasi kasus Yaman menjadi sekedar pertikaian antar faksi, antar suku, bahkan antar mahzab Sunni-Syi’ah, kenyataan keterlibatan negara-negara besar menunjukkan bahwa terdapat kepentingan geopolitik yang dominan dalam konflik tesersebut.

 **Sejarah Panjang Konflik Yaman**

Konflik yang terjadi di Yaman adalah konflik yang rumit, berkepanjangan, dan melibatkan pihak asing sejak awal mula munculnya konflik. Jika menengok sejarah konflik Yaman, faktor asing begitu dominan sebagaimana terjadi dalam setiap konflik di Negara Timur Tengah. Pasca Perang Dunia I, yang ditandai dengan berakhirnya kekuasaan imperiumOttoman, wilayah Yaman Selatan (terutama wilayan Aden) beralih ke Inggris.

Sementara itu, Yaman Utara dikuasai oleh Imam Yahya yang bermahzab Syi’ah Zaidiyah dan membentuk kerajaan Yaman. Sampai dengan tahun 1962, Yaman Utara masih menjadi salah satu bentuk konservatisme yang tangguh di dunia Arab, berkat sistem imamah yang begitu ketat. Kekuatan asing lah yang kemudian berusaha meruntuhkan kerajaan Yaman Utara. Inggris yang telah menguasai Yaman Selatan mendukung gerakan *Free Yemenis* di Yaman Utara yang berafiliasi dengan kelompok *Ichwanul Muslimin.* Upaya Inggris untuk menghancurkan pemerintahan Imam Yahya ini disebabkan oleh tekad Imam Yahya yang berusaha mengusir Inggris dan ingin menyatukan Yaman. Gerakan ini kemudian berhasil menggulingkan pemerintahan Imam Yahya dan memproklamasikan Republik Arab Yaman di Yaman Utara tahun 1962. Kendati demikian, pemberontakan militer *Free Yemenis* yang dipimpin oleh Abdullah Sallah ini tidak mudah dipatahkan karena pemerintahan keras yang berkuasa waktu itu, Imam Mohammad Badr, tidak bersedia menyerah begitu saja, sehingga, perang saudara antara perndukung imamah dan pendukung Republik tidak dapat dihindarkan, dan perang ini berlangsung selama 8 tahun. Perang saudara sampai dengan tahun 1970 ini merupakan bentuk “*a war by proxy*”, antara Arab Saudi yang membantu Imam Badr dan Mesir serta Inggris (yang mendukung Sallah). (M.A.Rais, 1989:162).

 Pada tahun 1970, perang saudara di Yaman Utara berhasil dipadamkan, dan berdasarkan konstitusi 1970, kekuasaan politik dipegang oleh troika (*triple ruler*) yang terdiri dari presiden, perdana menteri, dan majelis menteri (kabinet). Meskipun demikian persoalan legitimasi politik kerap menjadi isu besar dalam pemerintahan Republik Arab Yaman yang ditandai dengan pergantian pemerintahan melalui cara kekerasan dan inkonstitusional. Pada tahun 1976, Presiden Abdul Rahman Iryani yang memimpin Troikadigulingkan oleh Kolonel Ibrahim Al Hamd, setahun kemudian (tahun 1977) AL Hamd dibunuh secara misterius dan digantikan oleh Ahmad Al Ghasmi.

Pada tahun 1978, Al Ghasmi dibunuh oleh seorang agen Presiden Salim Rubai Ali dari Yaman Selatan dan 2 hari setelah terbunuhnya Al Ghasmi, Rubai Ali sendiri dibunuh di Aden. Letkol Ali Abdullah Saleh kemudian menggantikan Al Ghasmi hingga terbentuknya Yaman bersatu tahun 1990 *(Ibid*). Politik Luar Negeri Yaman Utara pun sejak pertengahan tahun 1970an lebih ditentukan/ didikte oleh Arab Saudi karena setiap rezim Yaman Utara bergantung pada bantuan ekonomi Saudi.

Pada tahun 1967, di Yaman Selatan, kelompok sosialis membentuk pemerintahan Republik Demokrasi Rakyat Yaman. Munculnya rezim *Marxist-Leninist* ini harus dilihat dari konteks radikalisasi politik Arab yang terjadi pada tahun 1960an. Pada periode itu, sumber konflik utama di Timur Tengah adalah antara kekuatan monarkhi konservatif melawan republik nasionalis. Gamal Abdul Nasser (Presiden Mesir waktu itu), dengan gagasan-gagasannya yang reformis sebagi pencetus nasionalisme Pan-Arab menjadi symbol orientasi revolusioner dunia Arab (Hudson, 1977:354). Selain Nasserisme, Partai Baath dengan ide sosialisme Arab yang mencita-citakan transformasi social ekonomi dan kultural juga disukai di kalangan kelas menengah Arab dan terpelajar Arab. Ideologi Partai Baath ini kemudian menghadirkan penguasa di Irak dan Suriah.

Arus ideologi ketiga adalah Gerakan Nasionalis Arab (*The Arab Nationalist Movement* = ANM) yang didirikan di Beirut, Lebanon, oleh seorang pejuang Palestina pada tahun 1948. Orientasi ideology ANM ini adalah Pan-Arabisme dan menyerukan kembalinya wilayah Palestina melalui persatuan Arab. Ketika Nasser muncul sebagai pahlawan pan-Arabisme di pertengahan 1950-an, Organisasi ANM ini menjadi penopangnya selama kurun waktu 1950-an sampai dengan 1960-an. ANM membentuk kelompok-kelompok revolusioner Arab, termasuk di Yaman Selatan. ANM ini kemudian membentuk kelompok revolusioner Front Pembebasan Nasional, dan memulai perjuangannya mengusir Inggris, menghancurkan federasi para syeikh dan sultan yang diharapkan dapat menggantikan kedudukan Inggris di Yaman Selatan. Front. Pembebeasan Nasional ini tidak hanya mampu mengusir Inggris, tetapi juga dapat mengalahkan rival-rivalnya Front Pembebasan Yaman Selatan (*Front for the Liberation of Occupied South Yemen*= FLOSY) ciptaan Mesir. Pada tahun 1969, faksi Abdul Fattah Ismail dari Front Pembebasan Nasional merebut kekuasaan dari faksi Qatham Al-Sha’bi dan mendirikan rezim Marxist radikal yang berorientasi politik luar negerinya ke Uni Soviet.

Perbedaan orientasi politik luar negeri kedua Yaman (Yaman Utara dan Yaman Selatan), dan persoalan perbatasan kedua negara sering mewarnai konflik-konflik di antara keduanya. Meskipun demikian, memudarnya pengaruh USSR *(Union of Soviet Socialist Republics*) dan cita-citamendirikan Yaman bersatu terus berjalan hingga terwujud pada Mei 1990 dengan nama Republik Arab Yaman dengan Ali Abdullah Saleh sebagai presiden dan Ali Salim Beidh (yang semula Presiden Yaman Selatan dari Partai Sosialis) sebagai wakil presiden.

 **Konflik di Era Modern**

**Peta 1**

**Wilayah Yaman**



*Sumber*: parstoday.com

Untuk mempertahankan kekuasaannya, Presiden Ali Abdullah Saleh harus memerangi rakyatnya sendiri dengan cara menundukkan faksi-faksi politik yang ada di sekitarnya. Guna menundukkan orang-orang sosialis, Presiden Saleh bekerjasama dengan tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin yang mendirikan Partai Islah atau Partai Reformasi pada 13 September 1993. Tujuan didirikannya Partai Islah itu sendiri, menurut pendirinya, Syeikh Abdullah bin Hassan Al-Ahmar, adalah untuk melawan orang-orang sosialis. Presiden Saleh harus menggunakan tangan Partai Islah karena partainya sendiri (*The General People’s Congress*) terikat perjanjian unifikasidengan Partai Sosialis. Namun belakangan Partai Islah, Sosialis, dan Nasserite justru bergabung melawan Saleh dengan membentuk *Joint Meeting Parties* (JMP) (<http://liputanislam.com/opini/peta-konflik-yaman/>, diakses 2-4-2019).

Di lain pihak, Presiden Saleh juga tidak menyukai posisi kelompok Ikhwanul Muslimin yang semakin menguat paska keberhasilan IM menggulingkan kekuasaan Imam Yahya. Peningkatan kekuatan IM dalam birokrasi pemerintahan Saleh, pengaruhnya yang sangat besar di institusi pendidikan Yaman (karena mereka menguasai institusi pendidikan Yaman), serta besarnya dana IM berkat kemurahan Arab Saudi membuat Presiden Saleh berusaha melucuti kekuasaan IM dengan cara merombak sistem pendidikan. Pada tahun 2001, sejak itu, dukungan IM melalui Partai Islah terhadap Presiden Saleh menjadi terhenti. Hal ini terbukti pada perbandingan pilpres tahun 1999, dimana Partai Islah mencalonkan Saleh sebagai presiden, tetapi pada tahun 2006, mereka mendukung lawan Saleh, yaitu Faisal bin Shamlan, meskipun dimenangkan oleh Saleh.

Pada tahun 2004, suku Houthi yang bermahzab Syi’ah Zaidiyah menuntut otonomi khusus di wilayah Saadah sebagai protes atas bentuk diskriminasi di bidang sosial ekonomi terhadap kelompok ini oleh rezim Saleh. Namun, tuntutan Houthitersebut justru dihadapi dengan kekerasan senjata oleh Presiden Saleh yang dibantu Arab Saudi, sehingga meletus perang sipil yang menewaskan lebih dari 5000 tentara dan masyarakat sipil suku Houthi pada kurun waktu tahun 2004-2008 (*Ibid*).

Pada tahun 2009, kelompok Salafi atau Gerakan Yaman Selatan *(Al Hirak Al Janoubi*) yang dipimpin oleh Tariq Al Fadhli berusaha mengangkat senjata melawan Presiden Saleh. Al Fadhli (alumni jihad Afghanistan) yang bersama-sama jenderal Mohsenyang pernah berperan membantu Al Ahmad Saleh dan menundukkan faksi sosialis dan suku Houthi justru berpaling melawan Saleh karena dituduh akan merebut kekuasaan pemerintahan Saleh. Mereka kemudian bersekutu dengan Partai Islah untuk menghadapi Saleh. Di tahun yang sama, 2009, muncul aktor baru Yaman yaitu *Al Qaeda of the Arabian Peninsula* (AQAP). Organisasi AQAP ini, menurut pengakuan Hillary Clinton dalam *Hard Choices* (2011), adalah organisasi bentukan AS dan didanai oleh Arab Saudi yang tujuannya adalah mengamankan kepentingan AS di Yaman. Gerakan-gerakan AQAP di Yaman turut memperkeruh kekacauan social-politik Yaman, yang kemudian pada tahun 2015 ISIS bergabung dengan AQAP, bersekutu dengan Al Fadhli dan melakukan aksi pengeboman di sebuah masjid di ibukota Sana’a, sehingga menewaskan 142 orang jamaah, 351 orang luka-luka. Dengan alasan mengejar anasir-anasirAQAP, AS kemudian membombardir Yaman, sehingga antara tahun 2009-2011, ratusan rakyat sipil Yaman, termasuk anak-anak telah menjadi korban serangan bom pesawat tempur AS atas ijin Presiden Saleh. Dengan alasan menumpas Al Qaeda pula, AS kemudian memberikan dana bantuan keamanan sebesar USD 500 juta kepada Presiden Saleh dengan imbalan diijinkan Pulau Socotra milik Yaman untuk dipenuhi berbagai peralatan militer yang menjadi pangkalan canggih AS (*Ibid*)

 **Revolusi *Arab Spring* di Yaman**

Di bawah pemerintahan Saleh, rakyat Yaman mengalami kondisi kemiskinan yang sangat parah. Menurut Indeks Pembangunan Manusia PBB, Yaman adalah salah satu negara paling miskin di dunia, menduduki urutan ke -154 dari 187 negara. Satu dari tiap 5 orang warga Yaman atau 20% penduduknya mangalami kelaparan, dan 1 dari tiap 3 orang tidak memiliki pekerjaan. Tiap tahun 40.000 anak-anak meninggal sebelum berusia 5 tahun (https: [www.voaindonesia](http://www.voaindonesia), diakses 25 Maret 2019).

Sebaliknya, di tengah-tengah kesengsaraan rakyat Yaman, Slaeh justru berperilaku korup dan nepotism. Dia memimpin Yaman dengan merekrut orang-orang terdekatnya, termasuk keluarganya. Selama lebih dari 3 dasawarsa berkuasa, Saleh telah menumpuk kekayaan secara fantastis. Dari hasil sidang DK PBB pada 7 Desember 2017, dinyatakan bahwa Presiden Saleh telah melakukan korupsi atau mencuri uang negara sebesar USD 60 miliar atau setara dengan Rp 771 Triliun (<https://focustoday.com/2017/12/07/pbb-korupsi-771-trilyun-mantan-presiden-yaman-ali-abdullah-saleh/>, diakses 5-4-2019) . Kekayaan Saleh ini diyakini berasal dari kontrak penjualan minyak dan gas di Yaman. DK PBB juga menuduh Presiden Saleh, koleganya, keluarganya, dan rekan-rekan bisnisnya mencuri uang dari program subsidi minyak. Korupsi telah mengalir ke Presiden Saleh sebesar USD 2 miliar atau sekitar Rp 28 Triliun setiap tahun selama lebih dari 3 dekade kekuasaannya.

Kemiskinan, korupsi, kediktatoran, dan kekejaman Presiden Ali Abdullah Saleh di kalangan mayoritas rakyat Yaman dan konsentrasi kekuasaan di kalangan keluarga dan orang-orang dekatnya, telah mendorong munculnya perlawanan masif rakyat Yaman yang dalam waktu bersamaan juga dipicu oleh efek domino dari pemberontakan rakyat Arab melawan rezim-rezim despotik di negaranya atau dikenal sebagai Revolusi *Arab Spring*. Revolusi yang dimulai dari Tunisia tersebut kemudian menjalar ke Yaman. Ribuan orang demonstran turun ke jalan menuntut Presiden Saleh untuk mundur. Namun, tuntutan rakyat justru dijawab dengan kekerasan senjata. Sedikitnya 50 orang tewas ditembaki oleh para *sniper* suruhan Presiden Saleh. Kemarahan massa semakin menjadi, sehingga pada Juni 2011, istana kepresidenan di ibukota Sana’a diserang massa. Presiden Saleh terluka bakar hebat dan dilarikan ke Arab Saudi untuk menjalani perawatan.

Seiring dengan kondisi kesehatannya yang mulai pulih, Presiden Saleh bersikeras untuk pulang dan memimpin Yaman kembali, tetapi sekutu internasionalnya, termasuk AS dan Arab Saudi, mendesak dia untuk turun. Negara-negara Arab Teluk bahkan menjanjikan tempat tinggal yang layak di negara mereka, termasuk kekebalan hukum jika Saleh bersedia mundur. Pada Februari 2012 Presiden Saleh akhirnya menyerahkan kekuasaannya kepada wakilnya, Abdu Rabbo Mansour Hadi. Namun, penyerahan kekuasaan ke Hadi ini hanya dilakukan setengah hati, terbukti Saleh memanfaatkan momentum demo massa yang didominasi oleh kelompok Houthi dengan bergabung atau bersekutu bersama-sama kelompok tersebut untuk menggulingkan Mansour Hadi. Dalam kondisi terdesak, Presiden Mansour Hadi kemudian melarikan diri ke Arab Saudi, dan pada tanggal 26 Maret 2015, Arab Saudi beserta koalisinya yang terdiri dari Maroko, Uni Emirat Arab, Kuwait, Bahrain, Yordania, Qatar, Pakistan, Mesir, dan Sudan melakukan invasi ke Yaman, membombardir posisi-posisi kelompok Houthi di Sana’a dan merebut kembali pelabuhan Hudaydah yang dikuasai Houthi. Invasi Arab Saudi dan kawan-kawan ini tentu saja atas restu dari Amerika Serikat (AS). Dalam invasi ke Yaman yang tanpa resolusi Dewan Kemanan PBB ini AS menyediakan dukungan logistic, perangkat bom, pengisian bahan bakar pesawat tempur, dan bantuan intelijen. Sikap yang sama ditunjukkan oleh AS Ketika NATO menginvasi Libya tahun 2011, dengan membiarkan Inggris dan Perancis memimpin perang, padahal AS adalah kekuatan utama di balik itu. Dengan menerapkan strategi “leading from behind” AS tidak ingin dilibatkan dalam tuduhan pelanggaran hukum internasional dalam kedua agresi tersebut.

 Kekhawatiran Arab Saudi akan kemajuan kekuatan Houthi sejak demonstrasi besar-besaran pada September 2014 melawan Pemerintah transisi Abdu Rabbo Mansour Hadi membuat negara kerajaan tersebut frustrasi dan berhitung untuk menyerang Yaman. Kemajuan Houthi, yang dibuktikan dengan penguasaan ibukota Sana’a, kota Aden, dan pelabuhan Hudaydah, sebenarnya berkat bantuan unit tentara dan intelijen yang masih setia kepada Ali Adullah Saleh. Hal ini terjadi karena sejak tahun 2014 mantan Presiden Saleh beraliansi dengan kelompok Houthi dengan harapan mampu menyingkirkan Presiden Hadi dan akhirnya ia bisa berkuasa kembali. Presiden Hadi akhirnya terdesak dan pada awal tahun 2015 ditangkap oleh kelompok Houthi, meskipun ia kemudian berhasil kabur dan melarikan diri ke Aden, yang selanjutnya diungsikan ke Riyadh oleh Pemerintah Arab Saudi. Aliansi Ali Abdullah Saleh dengan pemberontak Al Houthi inilah yang kemudian mengakhiri hidup Saleh pada 5 Desember 2017, karena dibunuh oleh pejuang Houthi yang menganggap Saleh telah berkhianat.

 Melihat kondisi politik Yaman yang semakin memburuk tersebut mendorong Arab Saudi dan koalisinya menyerang posisi-posisi Houthi di ibukota Sana’a pada tanggal 26 Maret 2015.

Pasukan koalisi Saudi ini menerapkan strategi “shock and awe” guna menakut-nakuti musuh dan membuatnya tidak berkutik. Itulah sebabnya mengapa pasukan koalisi membabi-buta atau tidak pandang bulu dalam membombardir sasaran yang kebanyakan mengenai obyek sipil termasuk kamp pengungsi, pesta pernikahan, kendaraan sipil, kawasan pemukiman sipil, fasilitas medis, sekolah, masjid, pasar, pabrik, gudang makanan, airport, dan pelabuhan. Sedang bom yang digunakan oleh passukan koalisi Arab Saudi adalah jenis bom *cluster* (bom tandan) yang penggunaannya dilarang oleh PBB karena dampaknya yang sangat mematikan. Keadaan ini semakin diperburuk dengan upaya blockade koalisi Saudi terhadap pelabuhan Hudaydah yang menjadi pintu masuk bantuan makanan dan obat-obatan dari luar. Menurut data NGO, *Armed Conflict Location and Event Data Project* (ACLED), korban tewas di Yaman sejak invasi Arab Saudi adalah 60.000 orang, termasuk 85.000 anak-anak yang meninggal karena kelaparan (http: //dunia.tempo.co, diakses 25 maret 2019)

**Kepentingan Geopolitik Arab Saudi**

 Di balik kisah invasi koalisi Arab Saudi di Yaman, sebenarnya terdapat tujuan besar Saudi, yaitu membangun jalur pipa migas baru agar ketergantungan terhadap Selat Hormuz dapat dikurangi. Sektor energy merupakan 90% pendapatan Saudi dari ekspor, dan 45% dari GNP, oleh karena itu faktor keamanan menjadi sangat penting bagi negara kerajaan tersebut. Keinginan membangun jalur migas Saudi ini diketahui berdasarkan kabel rahasia dari kedubes AS di Yaman kepada Menlu AS tahun 2008 yang menginformasikan bahwa Saudi berniat membangun jalur pipa migas yang sepenuhnya dikuasai dan dioperasikan Arab Saudi melewati Propinsi Hadramaut hingga ke Teluk Aden (*lihat peta*). Hal ini yang kemudian mudah dipahami mengapa dalam aksi bombardier Yaman oleh koalisi Saudi Propinsi Hadramaut tidak pernah menjadi sasaran. Demikian juga dengan pelabuhan dan bandara internasional Al Mukalla (juga di Propinsi Hadramaut) yang dalam kondisi prima di bawah control AQAP yang didukung Arab Saudi. Rencana pembangunan pipa migas Saudi ini tidak pernah dipublikasikan oleh para pejabat Saudi dan AS, mereka selalu mengedepankan konflik proxy Saudi-Iran sebagai alasan perang di Yaman.

**Peta 2**

**Rencana jalur Pipa Minyak Arab Saudi**



*Sumber*: [https://ic-mes.org/energy/pecah-belah-dan-kuasai-yaman-dan-pipa-minyak/,diakses](https://ic-mes.org/energy/pecah-belah-dan-kuasai-yaman-dan-pipa-minyak/%2Cdiakses) 25 Maret 2019.

 Pada tahun 2007 Pemerintah Arab Saudi, Bahrain, UEA, Oman, dan Yaman bersama-sama meresmikan proyek *Trans-Arabian Oil Pipeline*. Proyek ini direncanakan dibangun dari Saudi (Ras Tannurah) dan UEA menuju ke Teluk Oman dan Teluk Aden. Pada tahun 2012 jalur Abu Dhabi-Fujairah (UEA) telah beroperasi, tetapi perjanjian jalur pipa dari Oman ke Iran untuk mengekspor gas Iran ke Oman telah menimbulkan ketidakpercayaan Saudi terhadap Oman. Hal ini kemudian semakin mendorong Arab Saudi untuk menguasai kawasan Hadramaut guna mewujudkan impian lamanya membangun jalur alternative yang tidak bergantung kepada Iran (Selat Hormuz). Untuk mempertahankan dan mengontrol Propinsi Hadramaut itulah maka Arab Saudi menanam dan mempersenajatai AQAP *(Al Qaeda of The Arabian Peninsula*).

Aliansi Arab Saudi-AQAP-Pemerintah Presiden Mansour Hadi terungkap ketika pada bulan Juni 2016, Presiden Hadi mengirim utusannya ke Jenewa, Swiss, untuk melakukan perundingan damai PBB. Utusan Presiden Hadi tersebut adalah seorang tokoh Al Qaeda Yaman, Abdulwahab Humayqani, yang terdaftar dalam list anggota teroris internasional. Humayqani aktif merekrut dan mendanai Al Qaeda Yaman, ia juga dicurigai berada di balik pemboman Al Qaeda di markas militer Yaman pada tahun 2012. Fenomena ini menunjukkan bahwa yang diinginkan Arab Saudi dan sekutunya di Yaman bukanlah menegakkan demokrasi, melainkan penguasaan geografis dan jalur strategis Yaman untuk tujuan politik mereka.

Nilai strategis Yaman bagi Arab Saudi dan AS, sebagaimana dikemukakan oleh konsulat militer AS dan NATO, Anthony Cordesman dari *Center for Strategic and International Studies*, bahwa “Yaman memiliki nilai yang sangat penting dan strategis bagi AS, dan penting bagi stabilitas Arab Saudi di tengah Negara-Negara Teluk. Wilayah Yaman dan pulau-pulaunya memainkan peran kritis dalam keamanan lalu lintas global, Bab el-Mandeb”.(<https://ic-mes.org/politics/perang-di-yaman-untuk-siapa>, diakses 3-4-2019). Selat Bab el-Mandeb adalah “a chokepoint” antara tanduk Afrika dan Timur Tengah, dan penghubung strategis antara Laut Mediterania dan Samudera Hindia, yang membawa hampir semua ekspor dari Teluk Persia menuju Terusan Suez dan jalur minyak Suez-Mediterania.(*lihat peta*) Bab el-Mandeb juga merupakan kawasan tersibuk ke-4 dunia, yang merupakan lintasan kapal-kapal tanker pembawa minyak sebanyak 3,3 juta barel per hari. Sedang lintasan tersibuk pertama adalah Selat Hormuz (17 juta barel per hari), disusul Selat Malaka (15 juta barel per hari), Terusan Suez (4,5 juta barel per hari), Teluk Turki ( 2,4 juta barel per hari), Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC) sebanyak 1 juta barel per hari, dan Terusan Panama 0,5 juta barel per hari.(<http://theglobal-review.com/membaca-krisis-yaman-dari-perspektif-geopolitik-dan-kawasan>, diakses 3-4-2019). Mengingat arti penting Bab el-Mandeb dan wilayah strategis Yaman secara keseluruhan ini, maka setiap kekuatan berbahaya di Yaman akan mengancam lalu lintas yang melewati Terusan Suez, termasuk minyak dan produk turunannya.

**Peta 3**

**Wilayah Bab el-Mandeb**

****

*Sumber*:egypttoday.com

**Kendala Al Houthi dan Iran**

 Upaya penguasaan jalur strategis Yaman oleh Arab Saudi tidaklah mudah, dan terkendala oleh meningkatnya kekuatan pemberontak Al Houthi, terutama sejak kelompok ini berhasil menduduki ibukota Sana’a pada September 2014, merebut kota pelabuhan internasional Teluk Aden dan Selat Bab el-Mandeb, serta membentuk pemerintah sementara pada Januari 2015. Pergerakan Houthi ini sangat mengusik kepentingan AS dan Barat, serta membuyarkan rencana Arab Saudi untuk menguasai Yaman. Betapa pentingnya Kawasan Teluk Aden dan Selat Bab el-Mandeb bagi AS dan sekutunya mendorong AS membuat sistem kendali melalui *US Control Command* dengan menempatkan Armada-5 untuk mengawasi hilir mudik tanker-tanker minyak di Selat Hormuz dan Bab el-Mandeb. Sementara Armada-6 mengawasiTerusan Suez, Selat Turki, dan BTC pipeline, sedang Armada-7 memantau Selat Malaka (*Ibid*). Bagi sekutu AS yang lain, yakni Israel, penguasaan kawasan Bab el-Mandeb oleh Al Houthi dapat mengganggu akses Israel ke Samudera Hindia, lebih khusus lagi akan memotong kemampuan Israel yang dengan mudah menyebarkan kapal selam nuklir ke Teluk Persia sebagai ancaman terhadap Iran. Oleh karena itu, dalam aksi invasi koalisi Negara-Negara Teluk ke Yaman pada Maret 2015 yang lalu, Israel ikut berpartisipasi dengan mengerahkan pilot-pilotnya untuk mengoperasikan pesawat-pesawat tempur Arab Saudi.

 Menguatnya kemampuan kelompok pemberontak Houthi tidak bisa lepas dari dukungan Iran di belakangnya. Pasca-revolusi Iran di bawah pimpinan Ayatullah Khomeini tahun 1979, Iran mampu menempatkan diri sebagai kekuatan baru dan berpengaruh di Kawasan Timur Tengah, menggeser pengaruh negara-negara Arab seperti Mesir, Irak, dan Arab Saudi. Meskipun antara kelompok Houthi dan Iran memiliki persamaan mahzab syiah, tetapi kerjasama keduanya lebih didasari oleh kepentingan politik. Politik luar negeri Iran yang anti-hegemoni asing di kawasan Timur Tengah, khususnya di Teluk Persia adalah kendala bagi kekuatan-kekuatan eksternal untuk menanamkan pengaruhnya di kawasan itu. Sementara Yaman sebagai jalur strategis dengan kepemilikan Selat Bab el-Mandeb dan Teluk Aden adalah rangkaian dari jalur kepentingan geopolitik Iran mulai dari Teluk Persia dan Selat Hormuz. Oleh karena itu, kekuatan asing yang berusaha mengusik Yaman akan segera mendapat respon dari pemerintah pusat Teheran.

 Dukungan Iran terhadap eksistensi Houthi dimulai sejak tahun 2005, Ketika Iran mendanai pembelian roket dan melatih para pemberontak Houthi di Propinsi Sa’adah, wilayah utara Yaman. Selanjutnya pada bulan April 2009, menurut laporan Dewan Keamanan PBB, sebuah kapal Iran memindahkan peti-peti senjata ke kapal Yaman di perairan internasional. Pada Mei 2009, 6 kapal Iran berlayar ke Teluk Aden dan dibenarkan oleh Komandan AL Iran, Laksamana Habibullah Sayyari, bahwa berlayarnya kapal Iran di wilayah territorial Yaman bertujuan untuk menjaga integritas wilayah Iran di bagian selatan, dan juga untuk melindungi pasukan Houthi di utara Yaman yang sedang bertempur melawan Arab Saudi. Pada bulan Agustus 2009, televisi Al-Arabiya melaporkan bahwa tantara Yaman menemukan 6 gudang senjata milik Houthi yang menyimpan senapan mesin buatan Iran, roket jarak pendek, dan amunisi lainnya dalam jumlah besar.(“UN: Iran Arming Houthi rebels in Yemen since 2009”, <http://www.timesofisrael.com/un-iran-arming-houthi-rebels-in-yemen-since-2009/>, diakses 16-3=2019).

 Pada bulan Februari 2011, sebuah kapal nelayan Iran disita oleh otoritas Yaman karena ditemukan membawa 900 senjata anti-tank buatan Iran dan roket anti-helikopter. *The New York Times*, dalam artikelnya pada bulan Maret 2012 mengutip pernyataan pejabat militer dan intelijen AS bahwa Pasukan Quds, suatu pasukan elit dari Korps Garda Revolusi Islam Iran *(Islamic Revolution Guard Corps, IRGC*), telah menyelundupkan sejumlah besar AK-47, granat berpeluncur roket, dan senjata lain untuk pemberontak Al Houthi di Yaman. Hasil investigasi atas penyitaan kapal Iran pada tahun 2013 menemukan 40 ton senjata berupa roket Katyusha M-122, *heat-seeking surface-to-air missiles*, RPG-75, *night vision googles*, system artileri dengan pelacakan target sejauh 40 kilometer, *silencer*, bahan peledak RDX sebanyak 2,66 ton, peledak C-4, dan senjata-senjata lainnya yang semuanya ditujukan untuk Houthi (*Ibid*).

 Pasca-pengambilalihan ibukota Sana’a oleh pemberontak Houthi pada bulan September 2014, bantuan Iran ke Al Houthi terus meningkat. Unit IRGC menempatkan pasukannya di Yaman untuk melatih dan melengkapi barisan pasukan Al Houthi. Selain itu, banyak pejuang Houthi melakukan perjalanan ke Iran dan Lebanon untuk pelatihan militer bersama kelompok Hizbullah. Sejak awal pemerintahan sementara Houthi tahun 2015, pengiriman bantuan logistic Iran ke Yaman semakin intensif. Bantuan logistik sebesar 15.000 ton makanan tsb berupa tepung, beras, gula, dan obat-obatan menuju kota Pelabuhan Hudaydah, dengan dikawal oleh dua kapal perang Iran yang bertujuan untuk menghindari serangan pasuka koalisi Teluk. Dukungan Iran terhadap pejuang Al Houthi di satu pihak, dan dukungan koalisi Teluk di bawah pimpinan Arab Saudi di pihak lain, telah menempatkan kedua negara yang bersaing di Kawasan Timur Tengah tersebut dalam situasi perang proxy (*proxy war*).

Penutup

 Konflik Yaman adalah konflik yang multi-dimensional dan sebuah contoh konflik yang sangat rumit. Posisi geografis Yaman yang sangat strategis telah menjadi sasaran negara-negara sekitarnya dan juga superpower AS beserta sekutunya untuk mengambil bagian dalam konflik. Konflik internal Yaman, yang kemudian berubah menjadi perang proxy antara Arab Saudi dan sekutunya vis a vis Iran tidak bisa semata-mata hanya dilihat dari perspektif konflik antara mahzab Sunni dan Syiah. Tetapi kepentingan geopolitiklah yang menonjol dalam persoalan ini. Konflik yang rumit dan berkepanjangan ini telah menimbulkan tragedi di kalangan rakyat sipil Yaman, dan mengusik rasa kemanusiaan bagi siapapun yang mengikuti perkembangan situasi konflik di Yaman. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen dari berbagai pihak yang terlibat dalam konflik untuk segera mengakhiri pertikaian menuju proses politik guna menyelesaikan peperangan yang telah menewaskan puluhan ribu orang.

**Daftar Pustaka**

Drysdale, Alasdair, and Gerald H. Blake, *The Middle East and North Africa: A Political Geography*, Oxford University Press, 1985.

Gerges, Fawaz A., *Amerika dan Islam Politik: Benturan Peradaban atau Benturan Kepentingan?* , AlvaBet, Jakarta, 2002.

Gray, Colin S., and Geoffrey Sloan, *Geopolitics, Geography, and Strategy*, Frank Cass Publisher, London, 1999.

Hudson Michael C., *Arab Politics: The Search for Legitimacy*, Yale University Press, USA, 1977.

Sihbudi, Riza, *Profil Negara-Negara Timur Tengah*, Pustaka Jaya, Jakarta, 1995

Rais, Amien, *Timur Tengah*, Pusat Studi Sosial, UGM, 1989.

<http://liputanislam.com/opini/peta-konflik-yaman/>, diakses 2-4-2019.

https: [www.voaindonesia](http://www.voaindonesia), diakses 25 Maret 2019

<https://focustoday.com/2017/12/07/pbb-korupsi-771-trilyun-mantan-presiden-yaman-ali-abdullah-saleh/>, diakses 5-4-2019

http: //dunia.tempo.co, diakses 25 Maret 2019. <https://ic-mes.org/politics/perang-di-yaman-untuk-siapa>, diakses 3-4-2019.

<http://theglobal-review.com/membaca-krisis-yaman-dari-perspektif-geopolitik-dan-kawasan>, diakses 3-4-2019.

“UN: Iran Arming Houthi rebels in Yemen since 2009”, <http://www.timesofisrael.com/un-iran-arming-houthi-rebels-in-yemen-since-2009/>, diakses 16-3=2019).